

ANALISIS PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK DI KELURAHAN SAUNG NAGA KECAMATAN BATURAJA BARAT

Dias Devieriana Putri

Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 2026

Revised January 2026

Accepted January 2026

Available online January 2026

diasrianaputri15@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Permukiman padat penduduk merupakan permasalahan strategis dalam pembangunan perkotaan karena berdampak pada kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 2.778 jiwa per km² sehingga termasuk kategori permukiman sangat padat. Karakteristik kawasan ditandai oleh kepadatan bangunan tinggi, jarak antar bangunan kurang dari 1-2 meter, keterbatasan prasarana dasar, minimnya ruang terbuka lingkungan, serta masih ditemukannya indikasi kekumuhan di beberapa bagian wilayah.

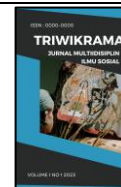
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penanganan permasalahan permukiman padat penduduk di Kelurahan Saung Naga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan optimal. Program penataan dan peningkatan kualitas permukiman belum dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian. Kondisi permukiman masih ditandai oleh kepadatan bangunan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta permasalahan lingkungan yang berpotensi menimbulkan kekumuhan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran kelembagaan secara normatif dengan pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci : Peran, Permukiman, Padat Penduduk, Kekumuhan

ABSTRACT

Densely populated settlements are a strategic issue in urban development due to their impact on environmental quality and community life. This condition occurs in Saung Naga Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency, with a population density of approximately 2,778 people per square kilometer, classifying it as a very densely populated settlement. Settlement characteristics include high building density, narrow distances between buildings of less than 1- 2 meters, limited basic infrastructure, lack of open space, and the presence of slum-related conditions in several areas. This study aims to analyze the role of the Housing and Settlement Areas Department of Ogan Komering Ulu Regency in addressing densely populated settlement issues in Saung Naga Village. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the role of the Housing and Settlement Areas Department has not been implemented optimally. Settlement arrangement and quality improvement programs have not been directly carried out in the research area. Settlement conditions remain characterized by building density, limited basic infrastructure, and environmental problems that potentially contribute to slum conditions. These findings reveal a gap between the normative institutional role and its implementation in practice.

Keywords : Role, Settlement, Population Density, Slums



PENDAHULUAN

Permukiman yang padat penduduk menjadi masalah utama dalam perkembangan perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, peningkatan urbanisasi, serta kurangnya lahan di area kota menyebabkan pembentukan wilayah hunian dengan kepadatan yang sangat tinggi yang tumbuh tanpa perencanaan tata ruang yang efektif. Situasi ini berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan, terbatasnya infrastruktur dasar, dan meningkatnya risiko masalah sosial serta kesehatan masyarakat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) adalah salah satu wilayah perkotaan yang sedang berkembang di Provinsi Sumatera Selatan dan juga menghadapi tantangan terkait permukiman padat penduduk, terutama di Kecamatan Baturaja Barat. Kelurahan Saung Naga merupakan salah satu area dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yang terlihat dari dekatnya bangunan-bangunan, kurangnya akses jalan lingkungan, dan minimnya ruang terbuka hijau. Kompleksitas kawasan ini semakin bertambah karena sebagian dari permukiman terletak di sekitar tepi Sungai Ogan, yang meningkatkan risiko terhadap bencana banjir dan kebakaran. Pemerintahan daerah memandang penanganan masalah permukiman sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) memiliki peran penting dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan terkait perumahan serta kawasan permukiman, termasuk upaya penanganan area permukiman yang padat dan kumuh. Namun, pelaksanaan peran tersebut dalam kenyataannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan perencanaan program, koordinasi antar instansi, serta keterbatasan sumber daya yang ada. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menangani isu-isu terkait permukiman yang padat penduduk di Kelurahan Saung Naga. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai seberapa jauh peran institusi dilaksanakan baik secara normatif maupun realitas, serta untuk mengidentifikasi adanya perbedaan antara kebijakan yang telah dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan.

METODELOGI

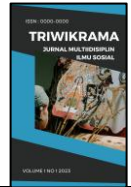
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi isu-isu permukiman yang padat, yang tidak dapat dinyatakan dalam angka.

Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis situasi permukiman yang padat di Kelurahan Saung Naga serta pelaksanaan fungsi kelembagaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, aparatur kelurahan, RT/RW, serta masyarakat setempat. Data tambahan juga dikumpulkan melalui observasi langsung dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini berlangsung secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Keabsahan data dijamin melalui penggunaan teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang sesuai dengan realitas di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman di Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, ditandai oleh tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan pola permukiman yang berkembang secara tidak terencana.



Kepadatan bangunan terlihat dari jarak antar rumah yang sangat sempit serta keterbatasan akses jalan lingkungan yang berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan permukiman. Minimnya ruang terbuka hijau, kondisi drainase yang belum memadai, serta keterbatasan sarana prasarana dasar menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi berkembang menjadi kawasan kumuh apabila tidak dilakukan penanganan secara berkelanjutan. Keberadaan permukiman di sekitar bantaran Sungai Ogan turut meningkatkan kerentanan terhadap bencana lingkungan berupa banjir dan pencemaran. Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi sangat penting dalam penanganan permukiman padat penduduk.

PELAKSANAAN PERAN

Pelaksanaan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum berjalan secara optimal meskipun secara normatif telah memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dalam penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman. Implementasi program secara langsung di Kelurahan Saung Naga masih terbatas sehingga belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi fisik lingkungan. Program penataan lingkungan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur pendukung belum dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan.

Ketidaksesuaian antara peran normatif dan pelaksanaan peran dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Penanganan permukiman padat penduduk membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan partisipasi masyarakat secara aktif. Koordinasi yang belum berjalan efektif menyebabkan program yang dirancang belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan permukiman padat di Kelurahan Saung Naga secara menyeluruh.

NORMA PERAN

Norma peran mengindikasikan bahwa secara hukum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki mandat serta kewenangan yang jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, pelaksanaan kewenangan ini di lapangan belum optimal, terutama dalam hal koordinasi antara instansi terkait. Situasi ini berpengaruh terhadap kurangnya kesetaraan dalam pelaksanaan program penanganan permukiman padat penduduk di berbagai wilayah yang memerlukan perhatian.

HARAPAN PERAN

Harapan peran dari masyarakat di Kelurahan Saung Naga menunjukkan keinginan untuk adanya perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman. Harapan ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan yang lebih baik dalam kawasan permukiman, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program. Hingga waktu penelitian ini berlangsung, pelaksanaan program belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan dari masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori peran yang menekankan pentingnya kesesuaian antara peran yang diharapkan dan peran yang dilaksanakan oleh suatu lembaga. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan permukiman padat penduduk di Kelurahan Saung Naga masih memerlukan penguatan implementasi kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Upaya penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi alokasi anggaran, serta pelibatan aktif masyarakat diperlukan agar penataan permukiman padat penduduk dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan analisis menunjukkan bahwa kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengatasi isu permukiman yang padat di Kelurahan Saung Naga belum dilakukan secara maksimal. Program yang bertujuan untuk merapikan dan meningkatkan kualitas permukiman belum diimplementasikan langsung di area penelitian, sehingga kondisi lingkungan permukiman masih menunjukkan beragam masalah, termasuk tingginya kepadatan bangunan dan minimnya infrastruktur dasar.

Temuan dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi lembaga yang diatur secara baku dengan pelaksanaan di lapangan. Diperlukan usaha untuk memperkuat peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, perencanaan program yang lebih tepat dan terarah, serta keterlibatan aktif masyarakat agar penanganan terhadap permukiman yang padat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Angka. Baturaja: BPS Kabupaten OKU.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: BPS.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.